

NASKAH ORISINAL

Katalisk: Peningkatan Kapasitas Mitigasi Bencana dan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) untuk Mendukung Pariwisata Berkelanjutan pada Destinasi Wisata Lembah Serimpi Magetan

Deti Rahmawati* | Adi Suryani | Soedarso | Ni Wayan Suarmini | Sonny Harry Budiutomo H. | M. Ubaidillah Al Mustofa | Fairuz Zahirah Zihni H. | Nila Cahayati | Muchammad Nurif

Departemen Studi Pembangunan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia.

Korespondensi

*Deti Rahmawati, Departemen Studi Pembangunan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia. Alamat e-mail: deti@its.ac.id

Alamat

Departemen Studi Pembangunan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia.

Abstrak

Lembah Serimpi merupakan destinasi wisata baru di Desa Randugede, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, yang mengalami lonjakan pengunjung sejak dibuka pada April 2024. Kenaikan jumlah wisatawan menunjukkan potensi ekonomi yang besar, tetapi di sisi lain menimbulkan permasalahan serius terkait rendahnya penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Hasil observasi menemukan belum tersedianya rambu evakuasi, penanda kedalaman kolam, maupun prosedur tanggap darurat, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan bagi wisatawan, khususnya anak-anak. Permasalahan ini menjadikan Lembah Serimpi menarik untuk dikaji karena menyangkut keberlanjutan pengelolaan desa wisata yang aman dan berdaya saing. Program pengabdian masyarakat berbasis partisipatif ini dilakukan melalui empat tahap: riset pendahuluan, penyusunan intervensi, edukasi/simulasi, serta monitoring dan evaluasi. Intervensi difokuskan pada penyediaan fasilitas K3 dan sarana keselamatan (papan informasi, *depth marker*, rambu evakuasi, titik kumpul, kotak P3K, dan pelampung). Kegiatan ini sukses meningkatkan pemahaman pengelola terhadap SOP keselamatan serta bertindak sebagai katalis dalam menumbuhkan budaya sadar risiko. Hasilnya, program ini berkontribusi menciptakan destinasi yang aman, meningkatkan kepercayaan wisatawan, dan mendukung pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat.

Kata Kunci:

BUMDes, Desa Wisata, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Mitigasi Risiko, Katalis Perubahan, Pariwisata Berkelanjutan.

1 | PENDAHULUAN

1.1 | Latar Belakang

Lembah Serimpi merupakan salah satu destinasi wisata baru yang terletak di Desa Randugede, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Tempat ini resmi dibuka untuk umum pada 13 April 2024 dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Randugede. Kehadiran BUMDes dalam pengelolaan wisata memiliki peran strategis, karena selain mengoptimalkan potensi alam desa, juga berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat setempat^[1]. Dengan mengusung konsep wisata keluarga, Lembah Serimpi menawarkan daya tarik berupa kolam renang bersih dengan latar pemandangan pegunungan, ditambah fasilitas pendukung seperti wahana permainan air, area kuliner tradisional, restoran, hingga *camping ground*. Keunggulan ini menjadikannya cepat populer, terutama di kalangan keluarga yang mencari alternatif rekreasi murah dan teratur di kawasan Magetan.

Antusiasme masyarakat terhadap destinasi ini tercermin dari lonjakan jumlah pengunjung sejak awal beroperasi. Pada masa libur Natal dan Tahun Baru 2025, tingkat kunjungan meningkat hingga 100% dibandingkan hari biasa, bahkan sempat mencapai 1.000 orang dalam satu hari, jauh di atas rata-rata akhir pekan sekitar 500–600 orang^[2]. Fenomena serupa terjadi pada momentum libur lebaran 2025, ketika dalam rentang waktu 2 Maret hingga 7 April 2025 tercatat sebanyak 5.181 wisatawan berkunjung, tidak hanya berasal dari Magetan tetapi juga dari luar daerah. Ini menunjukkan bahwa Lembah Serimpi memiliki potensi ekonomi yang besar sebagai motor penggerak pariwisata berbasis desa, sekaligus peluang strategis untuk memperkuat ekonomi lokal melalui sektor wisata.

Meski demikian, di balik keberhasilan menarik pengunjung dalam waktu relatif singkat, terdapat persoalan mendasar yang belum teratasi, yaitu minimnya penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Hasil observasi di lapangan memperlihatkan belum adanya penanda kedalaman kolam, jalur maupun rambu evakuasi, serta ketidakhadiran SOP keselamatan dan tanggap darurat. Selain itu, petugas penjaga kolam belum dilengkapi seragam atau identitas khusus yang dapat membedakan mereka dari pengunjung biasa. Kondisi ini tentu menimbulkan risiko, terutama bagi anak-anak yang mendominasi kelompok pengunjung. Padahal, kebijakan kesehatan pariwisata di Indonesia menekankan pentingnya aspek keamanan dan keselamatan wisatawan untuk menjamin keberlanjutan destinasi wisata^[3].

Ketiadaan standar keselamatan ini semakin krusial mengingat volume kunjungan yang tinggi. Tanpa adanya tata kelola yang baik, destinasi berisiko menghadapi berbagai masalah, mulai dari kecelakaan pengunjung, kelalaian pekerja, hingga potensi menurunnya reputasi wisata desa. Hal ini sejalan dengan peringatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bahwa destinasi wisata yang berkelanjutan harus memperhatikan keamanan dan kenyamanan pengunjung sebagai bagian dari strategi pengembangan. Oleh karena itu, meskipun Lembah Serimpi memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai destinasi unggulan di Magetan, masih terdapat tantangan serius dalam hal keselamatan yang harus segera diperhatikan agar daya tarik wisata ini dapat terjaga dan memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat. Dalam konteks ini, peningkatan kapasitas mitigasi risiko dan penerapan standar keselamatan dapat berperan sebagai katalis, yaitu sesuatu yang memicu terjadinya perubahan dan mempercepat proses perbaikan dalam tata kelola destinasi wisata. Kehadiran sistem keselamatan yang memadai tidak hanya mampu mengurangi potensi kecelakaan, tetapi juga mendorong terciptanya budaya sadar risiko, meningkatkan kepercayaan wisatawan, serta memperkuat keberlanjutan pengelolaan wisata berbasis masyarakat.

1.2 | Solusi Permasalahan atau Strategi Kegiatan

Pengabdian masyarakat ini mengusung judul KATALISK (Peningkatan Kapasitas Mitigasi Bencana dan K3) untuk mendukung pariwisata berkelanjutan di Destinasi Wisata Lembah Serimpi, Magetan. Istilah katalis sendiri dimaknai sebagai seseorang atau sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan, memicu munculnya kondisi baru, atau mempercepat suatu proses. Dalam konteks kegiatan ini, upaya peningkatan kapasitas mitigasi bencana dan penerapan K3 diharapkan menjadi katalis bagi terwujudnya tata kelola wisata yang lebih aman, tangguh, dan berkelanjutan. Strategi kegiatan Abmas di Lembah Serimpi dilaksanakan secara bertahap.

Tahap awal diawali dengan riset pendahuluan melalui wawancara dan studi dokumentasi guna memetakan potensi risiko keselamatan, mengidentifikasi kelalaian dalam penerapan SOP, serta menilai kapasitas awal pengelola dalam manajemen risiko dan pertolongan pertama. Hasil riset tersebut kemudian menjadi dasar dalam penyusunan berbagai solusi, seperti materi edukasi

keselamatan, SOP wisata kolam renang, desain rambu keselamatan, jalur evakuasi, serta modul pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K). Tahap berikutnya difokuskan pada pelaksanaan edukasi dan simulasi kepada pengelola wisata melalui sosialisasi SOP keselamatan, penggunaan perlengkapan mitigasi, serta praktik penanganan insiden di area kolam renang. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kesiapsiagaan pengelola dalam menghadapi berbagai potensi keadaan darurat yang dapat terjadi di kawasan wisata. Selain itu, pendekatan partisipatif yang digunakan memungkinkan masyarakat dan pengelola terlibat aktif dalam proses pembelajaran sehingga tercipta rasa memiliki terhadap sistem keselamatan yang dibangun.

Program kemudian diperkuat melalui tahapan *monitoring* dan evaluasi untuk menilai tingkat pemahaman peserta, efektivitas intervensi yang dilakukan, serta kesiapan pengelola dalam menerapkan prosedur keselamatan secara mandiri. Evaluasi dilakukan melalui observasi, wawancara, dan survei kepada peserta kegiatan. Seluruh rangkaian kegiatan ditutup dengan penyusunan laporan akhir yang memuat capaian program, hasil evaluasi, serta rekomendasi tindak lanjut. Dengan demikian, program ini diharapkan tidak hanya menghasilkan peningkatan fasilitas dan prosedur keselamatan, tetapi juga menjadi katalis yang mendorong terbentuknya budaya sadar risiko dan pengelolaan wisata yang lebih profesional serta berkelanjutan di Lembah Serimpi.

1.3 | Target Luaran

Solusi yang ditawarkan melalui kegiatan Abmas ini diarahkan pada peningkatan standar keselamatan di kawasan wisata Lembah Serimpi sekaligus penguatan kapasitas pengelola. Fokus utama adalah menghadirkan sarana keselamatan yang memadai, seperti papan peta lokasi, *depth marker*, rambu evakuasi dan titik kumpul, papan informasi rumah sakit, serta papan aturan kolam. Fasilitas tersebut dipadukan dengan pengadaan peralatan pendukung berupa *life buoy*, *life jacket*, rompi *lifeguard*, dan kotak P3K yang dapat digunakan secara langsung oleh pengunjung maupun petugas dalam situasi darurat. Selain sarana fisik, luaran yang ditargetkan adalah meningkatnya pemahaman dan keterampilan pengelola dalam menjalankan standar operasional prosedur (SOP) keselamatan melalui kegiatan edukasi, pelatihan, dan simulasi tanggap darurat. Pembentukan tim tanggap darurat lokal juga menjadi bagian dari capaian yang diharapkan, sehingga masyarakat dan pengelola memiliki kesiapan kolektif untuk merespons berbagai potensi risiko di area wisata.

Dengan tercapainya target tersebut, kegiatan Abdi Masyarakat diharapkan tidak hanya menghasilkan destinasi wisata yang lebih aman dan nyaman, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan desa wisata berbasis keselamatan. Keberhasilan program ini akan mendorong peningkatan jumlah kunjungan, loyalitas wisatawan, serta memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi Desa Randugede.

2 | TINJAUAN PUSTAKA

2.1 | Desa Wisata: Konsep, Tujuan, dan Tantangan Pengelolaan

Desa wisata dipahami sebagai bentuk pengembangan wilayah pedesaan yang memanfaatkan aset lokal seperti budaya, lingkungan, dan kegiatan ekonomi sebagai daya tarik wisata dengan tujuan pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Dalam studi literatur, menurut Ingkadijaya & Pramanik (2019) konsep pemberdayaan masyarakat menjadi inti pengelolaan desa wisata sehingga manfaat ekonomi dan sosial dapat dirasakan oleh komunitas lokal sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan warisan budaya^[4]. Pengelolaan yang berorientasi komunitas (*community-based tourism*) menuntut struktur kelembagaan lokal yang jelas, kapasitas SDM, serta mekanisme pembagian manfaat yang adil untuk mencegah konflik sosial dan degradasi sumber daya.

2.2 | Peran BUMDes dalam Pengelolaan Wisata Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan desa wisata. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan, dan digunakan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, serta usaha lainnya demi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Ketentuan ini menegaskan bahwa BUMDes tidak sekadar entitas usaha, tetapi juga instrumen penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa^[5].

Dalam konteks pengelolaan wisata, BUMDes berperan sebagai penghubung antara potensi desa dengan kebutuhan wisatawan. BUMDes dapat mengelola fasilitas wisata, mengatur atraksi, hingga melibatkan masyarakat dalam kegiatan ekonomi

yang mendukung pariwisata^[1]. Dengan demikian, keberadaan BUMDes menjadikan pengelolaan desa wisata lebih terstruktur, profesional, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini tercermin di Desa Randugede, Magetan, di mana BUMDes mengambil peran langsung dalam pengelolaan destinasi Lembah Serimpi sebagai upaya meningkatkan pendapatan desa sekaligus memperluas kesempatan ekonomi bagiarganya.

Lembah Serimpi merupakan destinasi wisata baru yang berlokasi di Desa Randugede, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Kawasan ini berada di dataran tinggi dengan panorama pegunungan yang asri sehingga menawarkan suasana sejuk dan alami bagi pengunjung. Letaknya yang tidak terlalu jauh dari pusat Kabupaten Magetan menjadikan Lembah Serimpi mudah diakses, sehingga cepat berkembang menjadi tujuan wisata populer, terutama bagi wisatawan keluarga.



Gambar 1 Terdapat 3 gambar; (a) Wisata Lembah Serimpi; (b) Kawasan Wisata Lembah Serimpi; (c) Foto Bersama Mitra

Salah satu kelebihan utama Lembah Serimpi adalah konsep wisatanya yang ramah keluarga. Fasilitas yang tersedia cukup lengkap, mulai dari kolam renang bersih dengan latar pemandangan pegunungan, wahana permainan air untuk anak-anak, area kuliner tradisional, restoran, hingga *camping ground*. Kombinasi antara harga yang terjangkau dengan suasana alam yang indah menjadikan Lembah Serimpi digemari oleh berbagai kalangan.

Bagi masyarakat, keberadaan Lembah Serimpi membawa peran yang sangat berarti. Pengelolaan oleh BUMDes Randugede memungkinkan manfaat ekonomi lebih merata karena masyarakat dilibatkan dalam berbagai aktivitas wisata, mulai dari pengelolaan fasilitas hingga pengembangan usaha kuliner dan jasa. Kehadiran wisata ini juga membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan warga, serta memperkuat identitas desa sebagai destinasi wisata yang berkembang pesat. Dengan demikian, Lembah Serimpi tidak hanya menjadi ruang rekreasi, tetapi juga motor penggerak ekonomi desa yang memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

2.3 | Risiko pada Sektor Pariwisata dan Desa Wisata

Risiko merupakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat memberikan dampak negatif terhadap pencapaian tujuan organisasi atau kegiatan tertentu. Menurut *International Organization for Standardization* dalam standar ISO 31000:2018, risiko didefinisikan sebagai efek ketidakpastian terhadap tujuan yang dapat menimbulkan konsekuensi positif maupun negatif^[6]. Dalam Sektor pariwisata, risiko menjadi aspek penting yang perlu dikelola karena industri ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, seperti kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan politik.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang rentan terhadap berbagai jenis risiko lingkungan berupa bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan cuaca ekstrem; kemudian risiko kesehatan dan keselamatan kerja, baik itu dari pengelola desa wisata maupun dari para pengunjung; selain itu juga terdapat risiko operasional yang berkaitan dengan kegagalan fasilitas dan pelayanan; serta risiko ekonomi yang berasal dari fluktuasi jumlah kunjungan wisatawan maupun perekonomian yang tidak stabil^[7]. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko menjadi kebutuhan penting dalam pengelolaan desa wisata. Proses manajemen risiko meliputi identifikasi risiko, analisis risiko, penanganan risiko, serta pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan^[6]. Penerapan manajemen risiko yang sistematis dapat membantu pengelola desa wisata mengurangi potensi kerugian, meningkatkan kesiapsiagaan terhadap ancaman yang mungkin terjadi, serta menjaga keberlanjutan destinasi wisata dalam jangka panjang^[8].

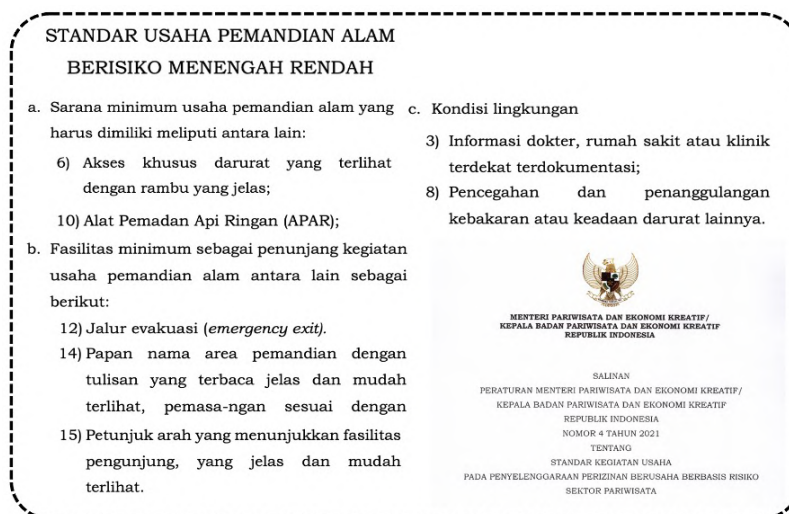
2.4 | Sosialisasi dan Pendekatan Pemberdayaan untuk Adopsi Mitigasi

Sosialisasi merupakan salah satu strategi penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap risiko dan upaya mitigasi yang perlu dilakukan. Pendekatan sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai proses pembelajaran yang mendorong perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap pengelolaan risiko^[9]. Melalui sosialisasi yang efektif, masyarakat dapat memahami potensi ancaman yang ada di lingkungan sekitarnya serta mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengurangi dampak risiko tersebut. Keberhasilan pengelolaan desa wisata tidak luput dari tingkat partisipasi masyarakat, keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting karena masyarakat merupakan pihak yang paling memahami kondisi lingkungan lokal sekaligus menjadi kelompok terdampak secara langsung apabila terjadi risiko atau bencana. Oleh karena itu, pendekatan yang partisipatif dinilai lebih efektif dibandingkan pendekatan yang hanya bersifat instruktif atau satu arah.

Salah satu bentuk pendekatan partisipatif yang banyak diterapkan adalah *co-design* atau perancangan bersama, yaitu proses penyusunan strategi mitigasi yang melibatkan masyarakat, pengelola wisata, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan lainnya^[10]. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap program mitigasi sehingga masyarakat lebih terdorong untuk menerapkan tindakan pencegahan dan kesiapsiagaan secara mandiri. Selain itu, metode pelatihan berbasis pengalaman seperti simulasi, diskusi kelompok, studi kasus lokal, dan praktik lapangan terbukti mampu meningkatkan pemahaman serta kesiapan masyarakat dalam menghadapi berbagai risiko^[9]. Komunikasi risiko juga menjadi elemen penting dalam proses sosialisasi mitigasi, seperti contoh penggunaan bahasa yang sederhana, media visual seperti peta risiko dan papan informasi, serta keterlibatan tokoh masyarakat atau tokoh adat dapat meningkatkan efektivitas komunikasi risiko dan memperkuat penerimaan masyarakat terhadap program mitigasi. Evaluasi kegiatan sosialisasi diperlukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program yang telah dilaksanakan. Evaluasi dapat dilakukan melalui pengukuran reaksi peserta terhadap kegiatan, peningkatan pengetahuan setelah pelatihan, serta perubahan perilaku yang ditunjukkan melalui kesiapan masyarakat dalam menerapkan prosedur mitigasi dan keselamatan^[11]. Dengan demikian, sosialisasi yang berbasis pemberdayaan masyarakat tidak hanya meningkatkan kapasitas individu, tetapi juga memperkuat ketahanan komunitas dalam menghadapi berbagai risiko yang dapat mengganggu keberlanjutan destinasi wisata.

2.5 | Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Pariwisata

Kesehatan dan keselamatan merupakan aspek fundamental dalam pengelolaan destinasi wisata. Kebijakan kesehatan pariwisata di Indonesia disusun untuk menjamin keamanan wisatawan sekaligus melindungi masyarakat dari potensi risiko kecelakaan maupun penyebaran penyakit^[3]. Dengan demikian, setiap destinasi dituntut memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, mulai dari pencegahan, penanganan darurat, hingga peningkatan kesiapsiagaan tenaga kerja di lapangan.



Gambar 2 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021

Sejumlah regulasi telah disiapkan pemerintah untuk memperkuat hal tersebut. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 mengatur standar usaha berbasis risiko, antara lain kewajiban menyediakan akses khusus darurat dengan rambu yang jelas, alat pemadam api ringan (APAR), jalur evakuasi, papan informasi area wisata, dan petunjuk arah fasilitas pengunjung^[5]. Selain itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memberikan dasar hukum bagi kesiapan destinasi menghadapi keadaan darurat. Kemenparekraf juga menerbitkan pedoman *Clean, Health, Safety, and Environment* (CHSE) untuk meningkatkan kepercayaan wisatawan^[12], sedangkan SNI 9042:2021 menegaskan standar keamanan dan keselamatan wisata alam yang dapat dijadikan rujukan^[13].

Bagi pengelola Lembah Serimpi, regulasi tersebut merupakan panduan penting dalam menata destinasi agar lebih aman dan berkelanjutan. Penerapan standar keselamatan seperti penyediaan rambu evakuasi, SOP tanggap darurat, serta fasilitas penunjang keselamatan akan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan wisatawan. Dengan langkah ini, Lembah Serimpi dapat berkembang tidak hanya sebagai ruang rekreasi keluarga, tetapi juga sebagai destinasi yang memenuhi prinsip keselamatan dan mendukung keberlanjutan pariwisata desa.

2.6 | Kerangka Teoritis: Integrasi DRM (Disaster Risk Management) dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Komunitas

Penelitian ini menggunakan kerangka teoritis yang mengintegrasikan konsep pemberdayaan masyarakat, manajemen risiko, dan ketahanan komunitas (*community resilience*). Pengembangan desa wisata berbasis komunitas yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi wisata, sementara manajemen risiko berperan dalam mengidentifikasi, menganalisis, serta mengendalikan berbagai risiko yang dapat mengganggu keberlanjutan destinasi wisata^[6, 9]. Integrasi *Disaster Risk Management* (DRM) dalam pengelolaan desa wisata diperlukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan adaptasi terhadap berbagai ancaman, baik yang bersifat alamiah maupun non alamiah. Pendekatan ini memungkinkan analisis terhadap aspek kelembagaan, teknis, dan sosial-ekonomi yang mempengaruhi ketahanan destinasi wisata sehingga pengembangan pariwisata dapat berjalan secara aman, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat^[8, 14].

3 | METODE KEGIATAN

3.1 | Pendekatan Kegiatan

Kegiatan mitigasi risiko dan keselamatan di kolam renang Desa Wisata Lembah Serimpi dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan partisipatif-edukatif. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggabungkan peran aktif masyarakat dengan upaya peningkatan pengetahuan secara berkelanjutan. Dalam praktiknya, masyarakat dan pengelola wisata tidak hanya diposisikan sebagai penerima informasi, melainkan menjadi pelaku utama yang terlibat dalam proses identifikasi potensi bahaya, perencanaan langkah mitigasi, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi hasil. Dengan demikian, setiap kegiatan yang dijalankan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan.

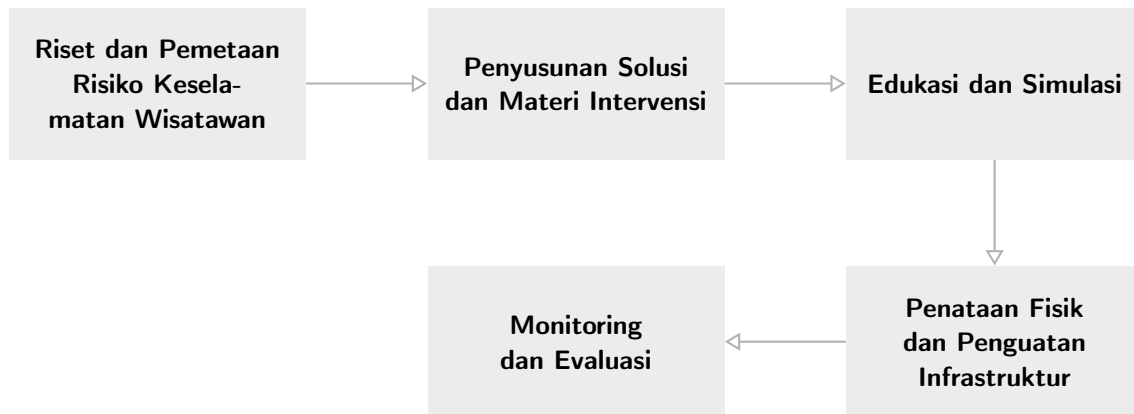
Aspek partisipatif diwujudkan melalui keterlibatan masyarakat lokal, pengelola wisata, serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam menyusun strategi keselamatan. Misalnya, melalui musyawarah, diskusi kelompok, maupun praktik langsung di lokasi, masyarakat dapat menyampaikan pengalaman dan pandangan mereka mengenai potensi risiko yang sering dihadapi. Hal ini membuat strategi yang dirancang lebih realistis, mudah diterapkan, dan sesuai dengan kebiasaan yang ada di lingkungan sekitar.

Sementara itu, aspek edukatif diwujudkan melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan, hingga simulasi penanganan keadaan darurat. Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh 15 peserta yang terdiri dari masyarakat, karyawan, hingga pengelola Desa Wisata Lembah Serimpi. Edukasi diberikan secara berkesinambungan agar tidak berhenti pada satu kegiatan saja, melainkan menjadi proses pembelajaran yang terus berjalan. Tujuannya adalah menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya keselamatan, membangun pemahaman dasar tentang cara menghadapi potensi bahaya, serta membentuk perilaku proaktif dalam menjaga keamanan di kawasan wisata air.

Dengan kombinasi kedua aspek tersebut, kegiatan mitigasi tidak hanya menghasilkan aturan atau prosedur teknis semata, tetapi juga menumbuhkan budaya sadar risiko di masyarakat. Budaya ini menjadi kunci keberlanjutan, karena ketika kesadaran dan keterampilan telah tertanam dalam diri masyarakat dan pengelola wisata, maka upaya menjaga keselamatan akan berjalan secara mandiri tanpa harus selalu bergantung pada pihak luar.

3.2 | Tahapan Pelaksanaan Program

Adapun diagram pelaksanaan dari kegiatan Abmas ini adalah sebagai berikut pada Gambar 4.



Gambar 3 Diagram Alir Tahapan Pelaksanaan Program.

4 | HASIL DAN DISKUSI

4.1 | Observasi yang Dilakukan kepada Mitra

Kegiatan observasi dilakukan melalui peninjauan langsung fasilitas wisata dan wawancara dengan pengelola Lembah Serimpi untuk mengidentifikasi kondisi keselamatan dan potensi risiko di kawasan wisata. Observasi difokuskan pada area kolam renang sebagai lokasi dengan aktivitas pengunjung tertinggi.

Hasil observasi menunjukkan bahwa kawasan wisata Lembah Serimpi telah memiliki fondasi fasilitas yang cukup memadai untuk menunjang wisata keluarga, namun secara bersamaan mengungkap celah keselamatan yang bersifat sistemik dan memerlukan penanganan segera. Ketidadaan *depth marker* pada seluruh area kolam menempatkan pengunjung terutama anak-anak dan mereka yang tidak mahir berenang dalam kondisi tidak dapat menilai risiko kedalaman secara mandiri, sehingga seluruh beban pengawasan jatuh pada penjaga kolam tanpa dukungan sistem yang memadai. Belum tersedianya jalur evakuasi dan titik kumpul darurat menjadi celah kritis yang dapat memperparah situasi saat insiden terjadi, karena kepanikan kolektif tanpa panduan arah terbukti meningkatkan risiko korban secara signifikan. Ketidakmemadai papan informasi keselamatan semakin melemahkan sistem komunikasi risiko yang seharusnya bersifat proaktif dan menjangkau seluruh pengunjung tanpa terkecuali, bukan hanya bergantung pada instruksi lisan yang terbatas jangkauannya. Lebih fundamental lagi, belum terdokumentasinya prosedur penanganan darurat dalam bentuk SOP menjadikan respons terhadap insiden sepenuhnya bertumpu pada improvisasi individual staf kondisi yang tidak hanya berisiko secara operasional, tetapi juga rentan secara hukum apabila terjadi kecelakaan. Keterbatasan perlengkapan mitigasi semakin melengkapi gambaran bahwa investasi pada pengalaman wisata belum diimbangi secara proporsional dengan investasi pada perlindungan pengunjung. Keseluruhan temuan ini tidak berdiri sendiri, melainkan mencerminkan satu pola yang sama yakni belum terbangunnya sistem manajemen keselamatan yang terintegrasi, dan sekaligus menjadi landasan empiris yang kuat bagi penyusunan program peningkatan kapasitas mitigasi risiko dan keselamatan wisata yang tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan.

4.2 | Pelaksanaan FGD

Pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) bersama mitra dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2025 di area pendopo Wisata Lembah Serimpi, Desa Randugede, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. FGD (*Focus Group Discussion*) merupakan metode diskusi kelompok terarah yang digunakan untuk menghimpun informasi, pandangan, pengalaman, serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait suatu permasalahan secara partisipatif. Kegiatan ini dihadiri oleh tim KKN-Abmas Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), pengelola BUMDes Randugede selaku pengelola wisata, perwakilan

masyarakat sekitar, karyawan operasional wisata, serta mitra terkait yang terlibat dalam pengelolaan kawasan wisata Lembah Serimpi.

Dalam pelaksanaannya, FGD diawali dengan pemaparan hasil observasi awal yang telah dilakukan oleh tim mengenai kondisi eksisting kawasan wisata, khususnya pada area kolam renang sebagai lokasi dengan tingkat aktivitas pengunjung tertinggi. Selanjutnya, peserta diskusi bersama-sama mengidentifikasi berbagai potensi bahaya dan risiko yang mungkin terjadi, seperti risiko tenggelam akibat tidak adanya penanda kedalaman kolam (*depth marker*), belum tersedianya jalur evakuasi dan titik kumpul darurat, keterbatasan perlengkapan keselamatan seperti pelampung dan kotak P3K, serta belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) keselamatan dan tanggap darurat yang terdokumentasi dengan baik. Selain itu, peserta juga memberikan masukan terkait kebutuhan peningkatan kapasitas petugas dalam penanganan kondisi darurat dan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K). Suasana proses FGD disajikan pada gambar 4a.

Melalui proses diskusi yang berlangsung secara interaktif, diperoleh kesepakatan mengenai prioritas kebutuhan keselamatan yang harus segera dipenuhi untuk mendukung keamanan wisatawan dan keberlanjutan pengelolaan destinasi wisata. Hasil FGD menunjukkan bahwa kawasan Wisata Lembah Serimpi memerlukan penyediaan berbagai sarana keselamatan seperti papan peta lokasi (*You're Here Map*), *depth marker*, papan aturan kolam (*pool rules*), jalur evakuasi, titik kumpul, papan informasi rumah sakit terdekat, papan informasi pertolongan pertama, *life buoy*, *life jacket*, *lifeguard vest*, kotak P3K, serta Alat Pemadam Api Ringan (APAR). Selain itu, FGD juga menghasilkan rekomendasi penyusunan SOP keselamatan wisata dan pelaksanaan sosialisasi mitigasi risiko bagi pengelola dan masyarakat. Hasil FGD kemudian menjadi dasar dalam penyusunan program pengabdian masyarakat, pemetaan risiko kawasan wisata, serta pengadaan sarana dan prasarana mitigasi yang disesuaikan dengan kondisi lapangan.

4.3 | Pemetaan dan Penyediaan Kebutuhan Mitra

Penyusunan pemetaan risiko dan penyediaan kelengkapan yang dibutuhkan dilakukan sebagai langkah lanjutan setelah FGD sehingga program mitigasi dapat dijalankan secara terarah dan sesuai kondisi lapangan. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa kawasan Desa Wisata Lembah Serimpi belum memiliki beberapa sarana penunjang keselamatan yang pada dasarnya diperlukan seperti titik kumpul evakuasi, penanda kedalaman kolam, pelampung, Alat Pemadam Api Ringan (APAR), *lifeguard vest*, serta rambu-rambu jalur keselamatan dan jalur evakuasi. Ketidakadaan perlengkapan keselamatan tersebut berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan pada area wisata, terutama untuk anak-anak. Oleh karena itu, pengadaan perlengkapan keselamatan menjadi prioritas utama dalam program mitigasi ini untuk meminimalisir risiko dan memperkuat sistem mitigasi bencana di kawasan Desa Wisata Lembah Serimpi.

Penyusunan pemetaan risiko merupakan tahapan lanjutan yang dilaksanakan secara sistematis pasca pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD), dengan tujuan memastikan program mitigasi keselamatan dapat diimplementasikan secara terarah, terukur, dan kontekstual sesuai kondisi aktual lapangan. Proses pemetaan risiko ini mengadopsi pendekatan analisis kerentanan yang bersifat komprehensif, mencakup identifikasi titik-titik rawan kecelakaan, evaluasi ketersediaan sarana keselamatan eksisting, serta penentuan skala prioritas pengadaan perlengkapan berdasarkan tingkat urgensi dan potensi dampak risiko yang teridentifikasi. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa kawasan Desa Wisata Lembah Serimpi mengalami defisiensi yang signifikan pada sejumlah komponen infrastruktur keselamatan yang secara normatif merupakan persyaratan minimum operasional destinasi wisata berbasis perairan. Komponen yang belum tersedia meliputi titik kumpul evakuasi, penanda kedalaman kolam, peralatan penyelamatan perairan berupa *life buoy* dan *life jacket*, Alat Pemadam Api Ringan (APAR), *lifeguard vest*, serta rambu-rambu petunjuk jalur keselamatan dan jalur evakuasi darurat. Ketiadaan komponen-komponen tersebut secara kolektif membentuk kondisi defisit keselamatan yang berimplikasi langsung terhadap peningkatan probabilitas terjadinya insiden kecelakaan di kawasan wisata, dengan kelompok anak-anak sebagai populasi yang paling rentan akibat keterbatasan kemampuan respons dan kesadaran risiko yang dimiliki.

Mengacu pada temuan pemetaan risiko tersebut, pengadaan perlengkapan keselamatan ditetapkan sebagai prioritas utama dan intervensi strategis dalam kerangka program mitigasi yang dikembangkan. Penetapan prioritas ini didasarkan pada prinsip manajemen risiko berbasis bukti di mana ketersediaan sarana keselamatan yang memadai merupakan prasyarat fundamental bagi terbentuknya sistem perlindungan pengunjung yang efektif dan responsif. Pengadaan perlengkapan keselamatan secara terstruktur dan berbasis hasil pemetaan tidak hanya berfungsi untuk mereduksi tingkat risiko kecelakaan secara langsung, tetapi juga berkontribusi pada penguatan kapasitas sistem mitigasi bencana kawasan secara menyeluruh. Lebih dari itu, kelengkapan

sarana keselamatan yang terstandarisasi merupakan salah satu indikator kunci dalam penilaian kelayakan operasional destinasi wisata, yang secara tidak langsung berdampak pada peningkatan kepercayaan wisatawan, aksesibilitas pasar, serta keberlanjutan pengelolaan Desa Wisata Lembah Serimpi sebagai destinasi wisata yang aman, inklusif, dan berdaya saing tinggi.

4.4 | Pelaksanaan Abmas

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (Abmas) dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2025 di kawasan Desa Wisata Lembah Serimpi, Desa Randugede, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Kegiatan ini merupakan bagian dari program peningkatan kapasitas mitigasi risiko dan keselamatan wisata yang dilaksanakan oleh Tim KKN-Abmas Departemen Studi Pembangunan ITS bersama mitra pengelola wisata. Kegiatan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pengelola BUMDes Randugede, karyawan operasional wisata, masyarakat sekitar, hingga tim pelaksana pengabdian. Pelaksanaan program diawali dengan observasi lapangan dan identifikasi permasalahan keselamatan yang ada di kawasan wisata, khususnya pada area kolam renang yang menjadi pusat aktivitas pengunjung.

Setelah proses identifikasi kebutuhan selesai dilakukan, tim melanjutkan kegiatan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) bersama mitra untuk membahas hasil temuan lapangan serta menentukan prioritas kebutuhan keselamatan yang perlu dipenuhi. Berdasarkan hasil diskusi tersebut, tim kemudian menyusun pemetaan risiko dan merancang berbagai bentuk intervensi yang sesuai dengan kondisi kawasan wisata. Tahapan berikutnya berupa pengadaan dan penyerahan sarana mitigasi keselamatan, meliputi pemasangan *depth marker*, papan informasi keselamatan, jalur evakuasi, titik kumpul, *life buoy*, *life jacket*, *lifeguard vest*, kotak P3K, APAR, serta berbagai media informasi pendukung lainnya. Seluruh fasilitas tersebut disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan yang telah disepakati bersama mitra agar dapat digunakan secara optimal dalam mendukung keselamatan wisatawan.

Sebagai tahap akhir, dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai mitigasi risiko, penerapan SOP keselamatan, penggunaan perlengkapan keselamatan, serta prosedur penanganan keadaan darurat di area wisata. Kegiatan ini dilakukan melalui pemaparan materi, diskusi interaktif, demonstrasi penggunaan peralatan keselamatan, dan penyampaian rekomendasi tindak lanjut kepada pengelola wisata. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, pengelola dan masyarakat memperoleh peningkatan pemahaman mengenai pentingnya budaya keselamatan dalam pengelolaan destinasi wisata. Selain menghasilkan penyediaan sarana keselamatan yang lebih memadai, program Abmas ini juga mendorong terbentuknya komitmen bersama untuk menerapkan sistem mitigasi risiko secara berkelanjutan guna menciptakan lingkungan wisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (Abmas) dilakukan secara terstruktur melalui tahapan observasi awal, diskusi bersama mitra, hingga implementasi program mitigasi risiko di kolam renang Desa Wisata Lembah Serimpi. Seluruh rangkaian kegiatan melibatkan masyarakat dan pengelola wisata secara aktif, sehingga solusi yang dirumuskan tidak hanya relevan dengan kebutuhan lapangan, tetapi juga dapat diterapkan secara berkelanjutan.



Gambar 4 (a) Pelaksanaan FGD bersama Mitra di Lembah Serimpi; (b) Pelaksanaan Abmas oleh Tim KKN-Abmas Lembah Serimpi

4.4.1 | Penyerahan Perlengkapan Mitigasi kepada Mitra

Keselamatan pengunjung merupakan komponen fundamental dalam pengelolaan destinasi wisata berbasis air, yang secara langsung berkorelasi dengan kualitas layanan dan keberlanjutan operasional kawasan wisata. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan pemetaan kebutuhan (*need assessment*) yang dilakukan secara sistematis di kawasan kolam renang Desa Wisata Lembah Serimpi, ditemukan adanya kesenjangan signifikan antara ketersediaan sarana keselamatan yang ada dengan standar minimum keselamatan yang dipersyaratkan. Keterbatasan perlengkapan mitigasi kecelakaan di area perairan tersebut berpotensi meningkatkan tingkat risiko (*risk level*) secara proporsional, mengingat tingginya volume kunjungan wisatawan yang tercatat di kawasan tersebut. Kondisi demikian mengindikasikan urgensi intervensi yang terstruktur guna mencegah terjadinya insiden kecelakaan air yang dapat berdampak pada keselamatan jiwa pengunjung maupun reputasi destinasi wisata secara keseluruhan.

Bertolak dari temuan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini melaksanakan program penyerahan perlengkapan mitigasi keselamatan sebagai bentuk intervensi konkret dan terukur bagi pengelola kolam renang Desa Wisata Lembah Serimpi. Penyerahan sarana keselamatan ini merupakan implementasi dari pendekatan mitigasi risiko berbasis kebutuhan (*need-based risk mitigation*) yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas respons darurat pengelola sekaligus menciptakan lingkungan wisata yang aman dan terstandarisasi. Penguatan infrastruktur keselamatan ini diharapkan tidak hanya mereduksi probabilitas terjadinya kecelakaan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan (*trust*) wisatawan terhadap kualitas pengelolaan destinasi, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan daya saing dan keberlanjutan Desa Wisata Lembah Serimpi sebagai destinasi unggulan berbasis komunitas. Adapun rincian perlengkapan beserta fungsinya adalah sebagai berikut.

1. **Papan Peta You're Here**

Berfungsi sebagai penanda orientasi lokasi bagi pengunjung agar dapat mengetahui posisi mereka berada di dalam kawasan wisata, sehingga memudahkan navigasi dan respons darurat apabila dibutuhkan.

2. **Stiker Cetak dan Pylox untuk Depth Marker**

Berfungsi sebagai penanda kedalaman kolam renang yang ditempatkan di pinggir kolam untuk memberikan informasi yang jelas pada pengunjung atau wisatawan mengenai kedalaman air di setiap zona kolam.

3. **Rambu Jalur Evakuasi**

Berfungsi sebagai penunjuk arah yang memandu pengunjung menuju jalur keluar yang aman ketika terjadi situasi darurat sehingga proses evakuasi dapat berlangsung dengan tertib dan efisien.

4. **Papan Akrilik Evacuation Plan**

Berfungsi sebagai media informasi yang berisi denah dan prosedur evakuasi di kawasan wisata secara menyeluruh, memudahkan pengunjung maupun petugas dalam memahami alur penanganan keadaan darurat.

5. **Papan Titik Kumpul**

Berfungsi sebagai penanda lokasi berkumpul yang telah ditetapkan sebagai titik aman bagi seluruh pengunjung dan petugas setelah proses evakuasi dilakukan.

6. **Papan Informasi Rumah Sakit Terdekat**

Berfungsi menyediakan informasi kontak dan lokasi fasilitas kesehatan terdekat yang dapat dirujuk dalam kondisi darurat medis sehingga penanganan korban dapat dilakukan secara cepat.

7. **Papan Informasi Pertolongan Pertama**

Berfungsi sebagai panduan visual tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) yang dapat diakses dengan mudah oleh petugas maupun pengunjung saat menghadapi situasi darurat sebelum bantuan medis tiba.

8. **Papan Pool Rules**

Berfungsi sebagai media penyampaian aturan dan tata tertib penggunaan kolam renang kepada pengunjung, guna mencegah perilaku berisiko yang dapat memicu terjadinya kecelakaan di area wisata air.

9. **Life Buoy**

Berfungsi sebagai alat apung darurat yang digunakan untuk menolong korban yang mengalami kesulitan di dalam air tanpa mengharuskan petugas terjun langsung, sehingga meminimalkan risiko bagi penyelamat.

10. Life Jacket

Berfungsi sebagai pelampung perorangan yang dikenakan untuk menjaga daya apung tubuh di air, terutama bagi pengunjung yang tidak memiliki kemampuan berenang, sebagai langkah pencegahan risiko tenggelam.

11. Lifeguard Vest

Berfungsi sebagai rompi identitas resmi bagi petugas penjaga kolam (*lifeguard*), sehingga pengunjung dapat dengan mudah mengenali dan menghubungi petugas yang berwenang apabila membutuhkan pertolongan.

12. Kotak P3K

Berfungsi sebagai wadah perlengkapan pertolongan pertama yang berisi obat-obatan dan alat medis dasar untuk penanganan awal cedera ringan maupun situasi darurat medis di area wisata.

13. Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

Berfungsi sebagai perangkat pemadam kebakaran portabel yang dapat dioperasikan secara cepat untuk mengendalikan api pada tahap awal kebakaran, guna mencegah meluasnya kebakaran di kawasan wisata.



Gambar 5 Penyerahan perlengkapan mitigasi kepada Mitra.

4.4.2 | Pelaksanaan Sosialisasi kepada Mitra

Sosialisasi mitigasi dilaksanakan dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pengelola wisata mengenai potensi risiko di area kolam renang serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Materi yang disampaikan meliputi identifikasi potensi bahaya di area kolam renang, penerapan SOP keselamatan, penggunaan perlengkapan mitigasi seperti *life buoy*, *life jacket*, APAR, dan kotak P3K, serta pemahaman jalur evakuasi dan titik kumpul darurat. Kegiatan dilaksanakan melalui pemaparan materi, diskusi, dan demonstrasi penggunaan perlengkapan keselamatan. Berdasarkan hasil diskusi dan evaluasi pasca-kegiatan, peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai prosedur keselamatan dan penanganan keadaan darurat. Pengelola juga menyampaikan kesiapan untuk memanfaatkan sarana mitigasi yang telah diberikan guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengunjung.

Sosialisasi mitigasi risiko keselamatan di area wisata air merupakan salah satu intervensi edukatif yang krusial dalam upaya membangun budaya keselamatan (*safety culture*) yang terstruktur dan berkelanjutan di lingkungan destinasi wisata berbasis perairan. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dengan tujuan utama memberikan pemahaman komprehensif kepada masyarakat dan pengelola Desa Wisata Lembah Serimpi mengenai identifikasi, analisis, dan pengelolaan potensi risiko yang inheren di kawasan kolam renang. Materi sosialisasi dirancang secara sistematis mencakup beberapa aspek esensial, meliputi: identifikasi dan pemetaan potensi bahaya (*hazard identification*) di area perairan, internalisasi dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) keselamatan wisata, serta tata cara penggunaan perlengkapan mitigasi kecelakaan secara tepat dan efektif, seperti *life buoy*, *life jacket*, Alat Pemadam Api Ringan (APAR), dan kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K). Selain itu, peserta

juga diberikan pemahaman mengenai pemetaan jalur evakuasi dan penetapan titik kumpul darurat sebagai bagian integral dari sistem manajemen keselamatan kawasan wisata yang komprehensif.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi menerapkan pendekatan pembelajaran aktif yang mengintegrasikan tiga metode secara sinergis, yakni pemaparan materi berbasis konsep teoritis, diskusi interaktif untuk mengakomodasi pertukaran pengalaman dan identifikasi permasalahan spesifik lapangan, serta demonstrasi praktis penggunaan perlengkapan keselamatan guna memastikan penguasaan keterampilan teknis secara langsung oleh peserta. Evaluasi pasca kegiatan yang dilakukan melalui mekanisme diskusi terstruktur menunjukkan peningkatan signifikan pada tingkat pemahaman peserta terhadap prosedur keselamatan dan protokol penanganan kondisi darurat di area perairan. Selain itu, pengelola kawasan wisata secara eksplisit menyatakan kesediaan institusional untuk mengoperasionalkan seluruh sarana mitigasi yang telah diserahterimakan sebagai bagian dari komitmen jangka panjang dalam meningkatkan standar keamanan dan kenyamanan pengunjung. Capaian ini mengindikasikan bahwa pendekatan sosialisasi berbasis demonstrasi dan partisipatif efektif dalam membangun kapasitas sumber daya manusia pengelola wisata, sekaligus menjadi fondasi bagi terwujudnya sistem manajemen keselamatan wisata yang mandiri, responsif, dan berkesinambungan di Desa Wisata Lembah Serimpi.



Gambar 6 Pelaksanaan sosialisasi bersama Mitra.

5 | KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan mitigasi risiko dan keselamatan di kolam renang Desa Wisata Lembah Serimpi berhasil menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dan edukatif dapat menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Observasi terhadap mitra memberi dasar yang jelas untuk merancang langkah mitigasi yang tepat sasaran, sekaligus mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif akan pentingnya budaya keselamatan. Program ini berpotensi dilanjutkan secara berkelanjutan melalui pelatihan dan simulasi rutin agar tercipta destinasi wisata air yang aman dan berdaya bagi masyarakat. Keberhasilan program ini tidak semata diukur dari *output* teknis, melainkan dari cara pendekatan yang dipilih yaitu memadukan partisipasi aktif masyarakat dengan intervensi edukatif yang terstruktur. Pendekatan ini menempatkan warga dan pengelola destinasi bukan sebagai objek penerima program, melainkan sebagai subjek yang terlibat langsung dalam proses identifikasi masalah dan perumusan solusi. Hasilnya, program tidak hanya menghasilkan perubahan prosedural, tetapi juga perubahan *mindset* sebuah transformasi yang jauh lebih berkelanjutan dibanding sekadar pemberian alat atau instruksi sepihak. Program ini berkontribusi pada penguatan posisi Desa Wisata Lembah Serimpi sebagai destinasi yang tidak hanya menarik, tetapi juga aman dan berdaya. Standar keselamatan yang baik meningkatkan kepercayaan wisatawan, mengurangi risiko kecelakaan yang dapat merusak reputasi destinasi, dan secara jangka panjang mendorong pertumbuhan kunjungan yang berkelanjutan. Lebih dari itu, masyarakat yang berdaya dalam mengelola keselamatan wisata adalah masyarakat yang memiliki kendali atas masa depan ekonomi desanya sendiri sebuah esensi sejati dari pemberdayaan berbasis komunitas.

6 | UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Lembah Serimpi yang telah mendukung kegiatan Pengabdian masyarakat dan KKN ini. Pengabdian masyarakat ini juga mendapat dukungan pendanaan oleh Departemen Studi Pembangunan dengan Dana Departemen Studi pembangunan Tim KKN Abmas Wisata Lembah Serimpi 2025, sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

Referensi

1. Hastutik D, Padmaningrum D, Wibowo A. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Pongkok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten. *AGRITEXTS Journal of Agricultural Extension* 2021;45(1):46.
2. MagetanKita, Pengunjung Naik 100 Persen, Lembah Serimpi Jadi Destinasi Favorit di Magetan saat Libur Nataru;. <https://magetankita.com/pengunjung-naik-100-percent-lembah-serimpi-jadi-destinasi-favorit-di-magetan-saat-libur-nataru/>, diakses pada 2026. Online.
3. Ariyanti KS, Sari NPR, Soamole F, Nuria H, et al. Kesehatan Pariwisata. CV Get Press Indonesia; 2025.
4. Pramanik PD, Ingkadijaya R. The Impact of Tourism on Village Society and its Environmental. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 2018;145(1).
5. Republik Indonesia, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia.
6. International Organization for Standardization, ISO 31000:2018; 2018. ISO Standard.
7. Asmarawati SG, Pangeran P. ISO 31000-Based Risk Management and Balanced Scorecard to Improve Company Performance: A Case Study at Indonesian YNK Tour and Travel Company. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 2021;8(3):376.
8. Bahri AS, Sugiarto, Hendratono T, Palupi S, Amelia R, Jason J. Mitigating Operational Risk in Community-Based Tourism: Evidence from Tugu Utara Tourism Village, Indonesia. *Journal of Tourism and Sustainability* 2025;5(2):133–144.
9. Van Niekerk D, Nemaikonde L, Kruger L, Genade K. Community-based Disaster Risk Management. In: *Handbook of Disaster Research*; 2017.p. 411–429.
10. Cornwall A. Unpacking ‘Participation’ Models, meanings and practices. *Community Development Journal* 2008;43(3):269–283.
11. Liu W, Xu C, Peng Y, Xu X. Evolution of Tourism Risk Communication: A Bibliometric Analysis and Meta-Analysis of the Antecedents of Communicating Risk to Tourists. *Sustainability* 2023;15(12).
12. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia.
13. Badan Standarisasi Nasional, SNI 9042:2021; 2021. Standar Nasional Indonesia.
14. United Nations World Tourism Organization. *Tourism and Rural Development: A Policy Perspective*; 2023.

Cara mengutip artikel ini: Rahmawati, D., Suryani, A., Soedarso, Suarmini, N. W., Budiutomo H., S. H., Mustofa, M. U. A., Zihni H., F. Z., Cahayati, N., Nurif, M., (2026), Katalisk : Peningkatan Kapasitas Mitigasi Bencana dan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) untuk Mendukung Pariwisata Berkelanjutan pada Destinasi Wisata Lembah Serimpi Magetan, *Sewagati*, 10(3):680–692, <https://doi.org/10.12962/j26139960.v10i3.9053>.